

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan suatu negara pada dasarnya harus dikelola secara bertanggungjawab transparan dan patuh terhadap peraturan dan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tantangan yang dihadapi dewasa ini, sektor publik sering dipandang negatif oleh beberapa pihak. Sektor publik tidak terlepas dari pandangan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, padahal sektor publik merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang baik.

Bagi para pengguna laporan keuangan, audit merupakan suatu hal yang sangat penting dikarenakan dapat memberikan gambaran terkait pengevaluasian kinerja laporan keuangan dalam waktu periode tertentu. Pemeriksaan ini dilakukan oleh seorang profesi yang biasa disebut auditor. Salah satu tugas dan peran auditor adalah untuk memberikan keyakinan atau tingkat kewajaran yang memadai terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh manajemen, melalui pendapat atau opini dalam bentuk laporan auditor yang menggambarkan keadaan sesungguhnya atas suatu entitas bisnis dan telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor eksternal diharapkan mampu memberikan keyakinan kepada para pengguna laporan keuangan perusahaan bahwa laporan

keuangan yang diperiksa tidak mengandung salah saji yang material baik yang disebabkan oleh kekeliruan secara sengaja atau kecurangan (*fraud*).

Tindakan kecurangan atau *fraud* yang secara disengajadilakukan demi keuntungan pribadi semakin sering terjadi akhir akhir ini dengan berbagai modus para pelaku. Oleh karena itu, auditor selalu dituntut untuk mampu mengungkap adanya tindakan kecurangan serta kemampuannya dalam tugas audit juga harus ditingkatkan Para pengguna laporan keuangan akan lebih mempercayai informasi dalam laporan keuangan yang telah dibuat oleh agen setelah laporan tersebut diperiksa kebenarannya oleh auditor. Untuk itu, auditor harus memiliki kredibilitas dalam melakukan pekerjaannya sehingga auditor dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

Dewasa ini, publik semakin mempertanyakan kualitas audit yang dihasilkan oleh para auditor seiring dengan maraknya kasus-kasus yang terjadi baik di dalam negeri maupun di manca negara, dimana kasus-kasus tersebut berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para auditor. Padahal kebutuhan akan jasa audit semakin hari semakin meningkat. Salah satu pihak yang sangat membutuhkan jasa audit adalah para stakeholders. Hal ini dikarenakan, untuk membuat keputusan yang tepat dan benar, *principal* dan para pengguna laporan keuangan lainnya perlu memperoleh laporan yang berisikan data yang sesuai dengan kebenaran yang ada. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu adanya kekhawatiran

akan merebaknya skandal keuangan, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan dan profesi akuntan publik.

Prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain kompetensi, independensi dan etika profesi. Kompetensi auditor didukung oleh keahlian, pengetahuan umum dan mutu personal yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas audit, independensi diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dan didukung dengan pelaksanaan pekerjaan, penyusunan pelaporan dan program dan melaksanakan audit, etika profesi diperlukan agar auditor menerapkan *professional judgment* di dalam tugas pemeriksaannya dan mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi, serta pengalaman auditor agar didukung dengan banyaknya tugas pemeriksaan dan lamanya bekerja dalam melaksanakan tugas audit.

Adanya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah semakin menjelaskan pentingnya fungsi auditor internal khususnya pada institusi pemerintah. BPKP sebagai auditor internal presiden harus selalu meningkatkan kualitasnya baik individu di dalamnya maupun institusi secara keseluruhan agar mampu mengemban tugas-tugas yang diamanatkan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian intern pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKP dalam melaksanakan

kegiatannya dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu audit, konsultasi, asistensi dan evaluasi.

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas yang diaudit, kemudian auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim serta kemampuan dalam menganalisa permasalahan (Sukriah Ika, 2010:8).

Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun. Untuk memenuhi pertanggungjawaban profesionalnya, auditor pemerintah harus bersikap independen karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Ayuningtyas, 2017:19).

Etika Profesi adalah faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit. Standar etika diperlukan bagi profesi audit karena auditor memiliki posisi sebagai orang kepercayaan dan menghadapi kemungkinan benturan-benturan kepentingan. Kode etik atau aturan etika profesi audit menyediakan panduan bagi para auditor profesional dalam mempertahankan diri dari godaan dan dalam mengambil keputusan-keputusan sulit. Jika auditor tunduk pada tekanan atau permintaan

tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap komitmen pada prinsip-prinsip etika yang dianut oleh profesi.

Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen (agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelola. Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik (principal). Akan tetapi disisi lain, pemilik (prinsipal) menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah di biayainya. Sehingga terlihat adanya kepentingan yang berbeda antara manajemen dengan pemakain laporan keuangan.

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan auditor memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. Namun, publik semakin mempertanyakan kualitas audit yang dihasilkan oleh para auditor seiring dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi di dalam negeri maupun di mancanegara. Banyaknya perusahaan yang bangkrut karena kegagalan yang sering dikaitkan dengan kegagalan auditor, sehingga dapat mengancam tingkat kredibilitas laporan keuangan. Sebagai contoh kasus yang terjadi pada Garuda Indonesia ikut menyeret beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu KAP Kasner Sirumapea dan Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional), kedua KAP ini dikenakan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan

oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal ini bermula saat Laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018.

Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Grup membukukan laba bersih USD 809,84 ribu atau setara Rp. 11,33 miliar (Asumsi Kurs Rp.14.000 per dolar AS) angka ini melonjak tajam dibanding tahun 2017 yang menderita kerugian USD 216,5 juta. Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairul Tanjung dan Dony Oskaria (saat ini sudah tidak menjabat) menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT.Mahata Aero Teknologi yang memiliki hutang kepada maskapai berpelat merah tersebut yaitu terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto menyatakan, b Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto menyatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai standar akuntansi. (Okezone.com).

Akuntan publik yang mengaudit perusahaan yang terkena skandal akuntansi tersebut juga tergolong kantor akuntan publik (KAP) yang berukuran besar dan mempunyai reputasi di bidang keuangan, namun hal itu ternyata tidak menjamin bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan nilai perusahaan yang sesungguhnya. Padahal di sisi lain informasi keuangan yang akurat merupakan pertimbangan utama untuk menilai harga wajar suatu sekuritas, misalnya saham atau obligasi di pasar modal. Kegagalan dalam pelaporan keuangan dalam bentuk kecurangan atau kesalahan yang tidak dapat diungkapkan

oleh KAP saat melakukan audit mengakibatkan kerugian yang besar bagi investor dan kreditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Prihartini,dkk (2015) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif, dan obyektif. Semakin tinggi kompetensi seorang auditor, maka akan menghasilkan kualitas audit yang semakin baik. Harjanto (2014) Hasil pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa etika auditor, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai independensi, kompetensi dan kualitas hasil audit yang dituangkan dalam penelitian dengan judul **“Pengaruh Independensi, Kompetensi dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kualitas audit masih rendah karena beberapa auditor masih belum mampu mendeteksi salah saji yang material dari LK, belum melakukan kesesuaian dengan standar umum yang berlaku serta belum patuh melakukan Audit sesuai SOP.
2. Para auditor belum sepenuhnya menerapkan independensi, kompetensi dan etika auditor dalam menjalankan perannya sebagai audit independen.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan mengidentifikasi masalah didalam penelitian ini. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Barat.
2. Seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Barat.
3. Seberapa besar pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Barat.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ingin penulis teliti, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Barat.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian bagi akademis yaitu, memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi terutama tentang audit. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.